

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos | Media Indonesia | Wawasan |
| Tribun Jateng | Radar Semarang | Republika | Kompas | Media Online |

Wilayah: Kabupaten Blora

Halaman 11

Pembebasan Lahan 3,1 Hektar Untuk Bandara

Pemkab Siapkan Anggaran 15 Miliar

BLORA- Pemerintah Kabupaten Blora menyediakan APBD tahun 2019 senilai Rp 15 Miliar untuk pembebasan lahan seluas 3,1 hektare di sekitar lokasi pembangunan bandara Ngloram.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perhubungan Kabupaten Blora Bambang Soegiyatno dalam acara sosialisasi dengan puluhan warga Desa Ngloram dan Kapuan di balai desa Ngloram, belum lama ini.

“Pemkab Blora serius menindaklanjuti reaktivasi Bandara Ngloram. Tahun 2019 Pemkab mengalokasikan sekitar 15 Miliar dari APBD Kabupaten. Itu untuk pembebasan 3,1 hektare,” ujarnya.

Pembebasan lahan seluas 3,1 hektare yang ada di Desa Ngloram tersebut, untuk pembangunan rest area dan parkir.

“Untuk akses jalan, anggarannya lain lagi,” ungkapnya.

Tahun 2019 ini, lanjut Bambang, pembebasan lahan seluas 3,1 hektare harus sudah selesai. Sehingga tahun depan Kementerian Perhubungan bisa melaksanakan kegiatan lanjutan.

“Tahun 2020 diharapkan bisa membangun terminal. Warga tidak ada masalah. Pemerintah Kabupaten Blora berharap warga bisa membantu Pemkab,” harapnya.

Sementara itu Bambang perwakilan BPN Kabupaten Blora menjelaskan, untuk pembebasan lahan di sekitar bandara, akan dibentuk satuan tugas fisik guna melakukan pengukuran tanah

perbidang. Kemudian identifikasi bidang tanah terkait subyek hak.

“Kami berharap warga menjelaskan secara benar se-

jarah tanahnya. Kalau sertifikatnya ada yang digunakan untuk agunan, harus dijelaskan. Begitu pula jika tanahnya belum ber-

sertifikat juga harus dijelaskan kepada petugas. Agar bisa dicarikan jalan sehingga administrasinya lancar,” ujarnya.

Untuk menentukan harga tanah, lanjutnya, akan ada tim apresal. Dilanjutkan dengan keputusan pelepasan hak dan penerimaan ganti rugi.

“Penilaian harga tanah sifatnya netral,” ujarnya.

Kepala Desa Ngloram Diro Benny S menjelaskan, lahan seluas 3,1 hektare yang ada di wilayah Desa Ngloram tersebut, dimiliki oleh 17 warga Desa Ngloram dan 5 warga Desa Kapuan.

“Lahan milik warga Ngloram semuanya sudah bersertifikat. Kami berharap bulan Juli proses pembebasan lahan sudah selesai. Dan kami siap membantu seratus persen,” ujar Diro. **(jar/muz)**